

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran *International Labour Organization* dalam meningkatkan perlindungan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia menunjukkan kontribusi yang signifikan. Namun demikian, peran tersebut belum dapat dikatakan transformatif, mengingat intervensi yang dilakukan masih terbatas pada penguatan norma dan kapasitas, tanpa menghasilkan reformasi struktural yang mampu mengubah secara fundamental relasi kuasa dan praktik ketenagakerjaan di sektor tersebut. Temuan ini memperkuat argumen Liberalisme Institusional bahwa meskipun institusi internasional penting dalam memfasilitasi kerja sama, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepentingan dan kapasitas negara anggota. ILO berhasil mendorong Malaysia untuk meratifikasi instrumen-instrumen kunci seperti Protokol 2014 terhadap Konvensi Kerja Paksa 1930 dan mengadopsi kebijakan nasional seperti *National Action Plan on Forced Labour* (NAPFL) 2021-2025. Melalui proyek *konkret Advancing Workers' Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector*, ILO juga telah memberikan pelatihan bagi inspektur ketenagakerjaan, menyusun pedoman perekrutan yang adil, dan memfasilitasi dialog sosial tripartit.

Namun, efektivitas peran ini terbatas pada tingkat makro dan normatif. Dampaknya terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan mayoritas tenaga kerja di sektor ini masih bersifat tidak langsung dan terbatas. Kesenjangan

antara komitmen normatif dan implementasi di lapangan terjadi akibat beberapa faktor kunci. Pertama, Kendala Kedaulatan dan *Political Will*: Implementasi rekomendasi ILO, seperti *Community-Based Complaints Mechanism*, masih bergantung pada dan terhambat oleh kemauan politik dan kapasitas birokrasi pemerintah Malaysia. Kedua, Keterbatasan Jangkauan: Intervensi ILO cenderung berfokus pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya, sementara mengabaikan ribuan petani kecil dan pelaku informal yang dimana eksploitasi justru sering terjadi. Pendekatan ini meninggalkan celah struktural yang besar. Ketiga, Pengabaian Terhadap PMI Non-Prosedural: Sebagian besar PMI yang bekerja secara non-prosedural atau tidak berada di luar jangkauan semua mekanisme perlindungan formal yang difasilitasi ILO. Mereka tetap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi dan tidak terjamah oleh program ILO. Keempat, Kompleksitas Ekonomi-Politik: Kepentingan ekonomi Malaysia untuk mempertahankan daya saing industri kelapa sawit global sering kali berseberangan dengan agenda perlindungan pekerja yang maksimal. ILO tidak memiliki alat yang cukup untuk mengatasi dilema fundamental ini.

Dengan demikian, meskipun ILO telah berhasil menciptakan kerangka normatif dan institusional yang lebih baik untuk perlindungan pekerja, perubahan yang substantif dan menyeluruh bagi kehidupan PMI di perkebunan kelapa sawit Malaysia belum terwujud. Peran ILO berkontribusi pada pembentukan *enabling environment*, tetapi transformasi nyata masih sangat bergantung pada komitmen politik yang berkelanjutan dari pemerintah Malaysia dan Indonesia, serta penanganan akar masalah berupa sistem rekrutmen yang tidak transparan dan status

hukum pekerja migran. Temuan ini memperkuat argumen Liberalisme Institusional bahwa meskipun institusi internasional penting dalam memfasilitasi kerja sama, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepentingan dan kapasitas negara anggota.

4.2 Saran Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai kontribusi terhadap penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia dan sebagai keberlanjutan penelitian ini. Pertama, bagi *International Labour Organization* (ILO), perlu dilakukan penguatan terhadap mekanisme *monitoring* dan evaluasi atas implementasi standar ketenagakerjaan internasional di lapangan, khususnya di negara-negara penerima pekerja migran. ILO juga diharapkan memperluas kerja samanya dengan organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja lokal, dan komunitas migran agar dapat menjangkau kelompok pekerja yang paling rentan, terutama mereka yang tidak berdokumen. Proyek seperti *Advancing Workers' Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector* harus kembali dilakukan dan diperluas dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan cakupan wilayah intervensi, perluasan akses terhadap pekerja migran tidak berdokumen, serta penguatan kerja sama lintas sektor yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Selain itu, evaluasi berbasis data lapangan dan partisipasi langsung dari pekerja migran perlu diintegrasikan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kedua, bagi Pemerintah Indonesia, perlu adanya harmonisasi kebijakan migrasi tenaga kerja dengan standar internasional yang diusung oleh

ILO, termasuk optimalisasi pelatihan pra-keberangkatan bagi calon PMI, serta penguatan perlindungan hukum bagi pekerja yang menghadapi eksploitasi di luar negeri. Ketiga, Pemerintah Malaysia disarankan untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum ketenagakerjaan, mendorong ratifikasi konvensi-konvensi ILO yang berkaitan dengan pekerja migran, serta memperluas ruang kebebasan berserikat bagi pekerja migran di sektor perkebunan. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam guna mengevaluasi dampak nyata proyek ILO terhadap kondisi pekerja migran secara langsung, serta menelusuri praktik baik dan tantangan yang belum terungkap melalui pendekatan dokumen dan laporan sekunder.